

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN
SISTEM OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN BUMN**



SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN
SISTEM OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN BUMN**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**

**Disusun Oleh :
DEVID RIANSAH
NIM : 02114109**

**PRO PATRIA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2018**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

DENGAN INI MENYATAKAN BAITWA SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN
SISTEM OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN BUMN**

LAYAK UNTUK DILAKUKAN SIDANG UJIAN SKRIPSI

SURABAYA, 07 AGUSTUS 2018

DOSEN PEMBIMBING



M. YUSRON MZ. S.H., M.H.
NIDN : 0730036602

MENGETAHUI,
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



TAHEGGA PRAMANANDA ALFATH, S.H., M.H.
NIDN : 0711058902

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 7 Agustus 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



M. YUSRON MZ, S.H., M.H

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

Halaman Pengesahan

Skripsi yang diajukan oleh:

DEVID RIANSAH

NIM: 02114109

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tanggal 7 Agustus 2018

Tim penguji

TUTIEK RETNOWATI, S.H., M.Hum

KETUA

M. YUSRON MZ, S.H., M.H

SEKERTARIS

TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, S.H., M.H

ANGGOTA



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : DEVID RIANSAH
No. Induk Mahasiswa : 02114109
Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2014

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PRAKTIK MENYIMPANG
SISTEM OUTSOURCING DI BUMN
2. TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN
SISTEM OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN BUMN.

Untuk disetujui sebagai Judul Skripsi dengan Usulan Dosen Pembimbing:

Mengetahui,

Calon Dosen Pembimbing

(M. YUSRI OTI MT)

Surabaya, 21 MARET 2018

Mahasiswa

(DEVID RIANSAH)

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Tahégga Primananda Alfath, SH., MH.

- Sertifikat hie. kurang 3.
- Unggah jurnal.



SURAT TUGAS
494/NR-FH/03/IV /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
M. Yusron MZ, S.H., M.H.	02114109	DEVID RIANSAH	Pertanggung Jawaban Pemerintah Terhadap Praktik Menyimpang Sistem Outsourcing Di BUMN

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 APRIL 2018



Prof. Dr. H. AFDOL, S.H., M.S.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FHK.06.02
Tgl Berlaku : 01 Maret 2016
Revisi : 01

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DEVID RIANSAH
No. Induk : 02119109
Alamat : Jatiasari Gg. palem no.6 pepelagi WARU
SIDARJO.
Telp/HP : 081332822688
Pembimbing : M. YUSRON MZ, S.H, M.H
Judul Skripsi : TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP
PENERAPAN SISTEM OUTSOURCING PADA
PERUSAHAAN BUMI.
Tgl Dimulai : 5 APRIL 2018

Pembimbing

Surabaya, 15, MEI, 2018
Mahasiswa

M. YUSRON MZ

DEVID RIANSAH

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.



No Dokumen : FM.FHK.06.02
Tgl Berlaku : 01 Maret 2016
Revisi : 01

Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

[illegible]

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Skripsi setelah bimbingan minimal 4 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL*

Nama Mahasiswa : *DEVID KIANUSATI*

No. Induk Mahasiswa : *02114109*

Program Studi/Angkatan : *Ilmu Hukum / 2014*

Dengan ini mengajukan permohonan SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

TANGGUNG CUGAT PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN

SISTEM OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN BUMN

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

(M. Yusron MZ)

Surabaya, *15 Mei* 20*18*
Mahasiswa

(DEVID KIANUSATI)

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

* Pengajuan seminar proposal skripsi harus menyertakan:

1. Proposal Skripsi 3 rangkap jilid warna merah
2. Copy kwitansi pembayaran Skripsi



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN SEMINAR

Nama Mahasiswa : DEVID RIANWATI

No. Induk : 02119109

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1	DEVID RIANWATI	TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PEMERKAPAN SISTEM OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN BUMIH	19 Mei 2018	<i>[Signature]</i>
2	JABRINA ISMINTIAS	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGOBAT SEBAGAI KAKYA CIPRA (UU No. 28 TAHUN 2014)	19 Mei 2018	<i>[Signature]</i>
3	WIDYA.P.SUSILO	TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH UTANG PAJAK DALAM E-COMMERCE	19 Mei 2018	<i>[Signature]</i>
4	MUCH. DEDY ANGGARA	PERTANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR BUKLA PAUDY DIMOSOS DI MASA DARI HAM	19 Mei 2018	<i>[Signature]</i>
5	SUSAKTI WIBOWO	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HAM	19 Mei 2018	<i>[Signature]</i>

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Surabaya, 19 Mei 2018
Mahasiswa

[Signature]
Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

[Signature]
DEVID RIANWATI



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FHK.06.04
Tgl Berlaku : 01 Maret 2016
Revisi : 01

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arief Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DEVID RIANSAH
No. Induk : 02119109
Alamat : JATISARI GANG PALEM No. 6 PEPELEG
NARU-SIDODARJO
Telp/HP : 081332822688
Pembimbing : M. YUSRON MZ SH. MH.
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP
SISTEM OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN
BCMA.
Tgl Dimulai : 21 MEI 2018

Pembimbing

Surabaya, 30, JULI, 2018
Mahasiswa

M. YUSRON MZ

DEVID RIANSAH

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Tahégga Primananda Alfath, SH., MH.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FHK.06.04
Tgl Berlaku : 01 Maret 2016
Revisi : 01

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	MATERI BAB I	21 Mei 2018	
2	REVISI BAB I	21 Mei 2018	
3	MATERI BAB II	1 Juni 2018	
4	REVISI MATERI BAB II	7 Juni 2018	
5	REVISI MATERI BAB II	14 Juni 2018	
6	REVISI SUB BAB II	21 Juni 2018	
7	REVISI SUB BAB II	21 Juni 2018	
8	MATERI BAB III	4 Juli 2018	
9	MATERI BAB III	11 Juli 2018	
10	REVISI BAB III	11 Juli 2018	
11	MATERI BAB IV	18 Juli 2018	
12	REVISI BAB IV	18 Juli 2018	
13	REVISI BAB IV	25 Juli 2018	
14	REVISI BAB IV	25 Juli 2018	



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FHK.06.01
Tgl Berlaku : 01 Maret 2016
Revisi : 01

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Devid Riansah

No. Induk Mahasiswa : 02114109

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2014

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

PENERAPAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP ~~KEBUDAYAAN~~ SISTEM
OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN BUMN.

Mengetahui
Pembimbing,

Surabaya, 30, JULI, 2018.
Mahasiswa


M. YUSRION MZ


DEVID RIANSAH

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi


Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

* Pengajuan seminar proposal skripsi diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal seminar proposal skripsi, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Kartu Pembimbingan (minimal 12 kali pembimbingan)
2. Sertifikat TOEFL/ILT dengan skor minimal 450
3. Tidak memiliki nilai D
4. Skripsi 3 rangkap

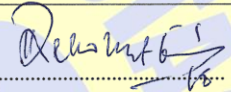

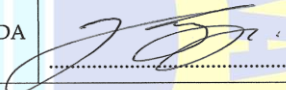


FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : DEVID RIANSAH
N I M : 02114109
Tanggal Penilaian :
Judul Skripsi : TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP
PENERAPAN SISTEM OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN
BUMN
Pembimbing : M. YUSRON MZ, S.H., M.H

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	TUTIEK RETNOWATI, S.H., M.Hum.	
SEKRETARIS	M. YUSRON MZ, S.H., M.H	
ANGGOTA	TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, S.H., M.H	

Surabaya, Agustus 2018
Pembimbing,

PRO PATRIA

M. YUSRON MZ, S.H., M.H

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devid Riansah
NIM : 02114109
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tanggung Gugat Pemerintah terhadap Penerapan Sistem Outsourcing pada Perusahaan BUMN

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 Juli 2018

Yang membuat pernyataan

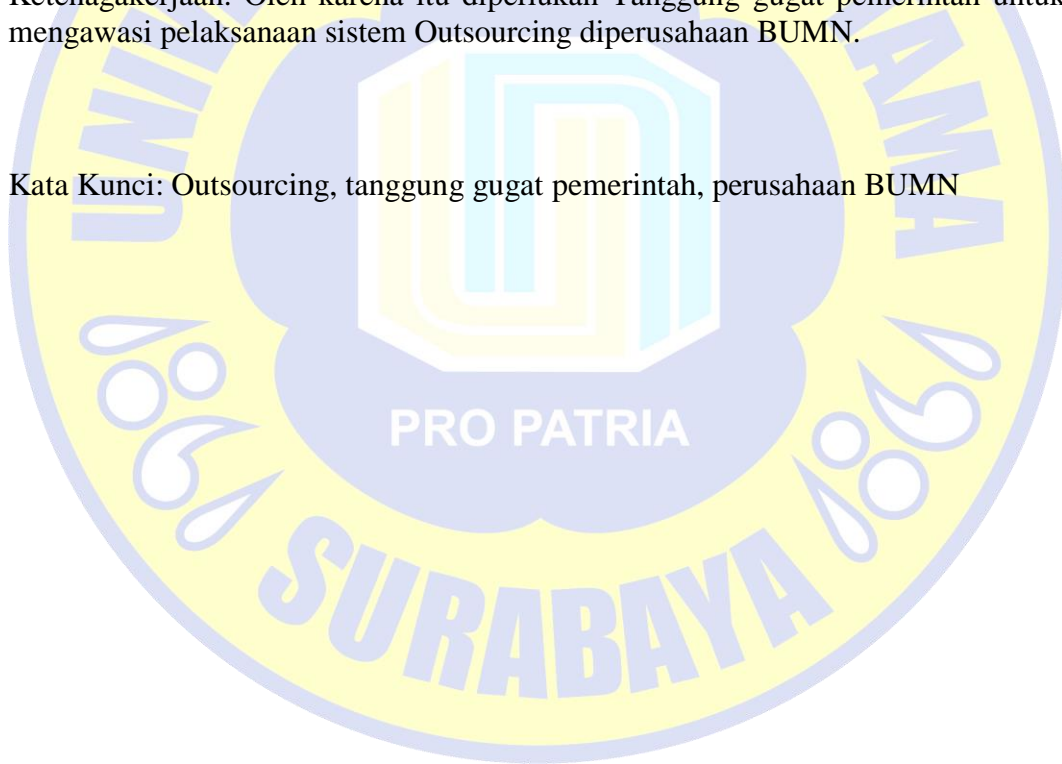


DEVID RIANSAH
NIM : 02114109

ABSTRAK

Salah satu polemik dalam ketenagakerjaan yang banyak mendapatkan sorotan adalah permasalahan outsourcing. Outsourcing dapat disebut juga sebagai perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis. *outsourcing* banyak dilakukan untuk menekan biaya pekerja/buruh (*labour cost*) dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh dibawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekerja/buruh. Sistem Outsourcing di Indonesia masih ada praktik menyimpang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, pekerja yang bekerja diperusahaan tersebut telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan BUMN sehingga banyak pekerja yang tidak dapat terpenuhi hak-hak normatifnya sebagaimana yang diatur Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu diperlukan Tanggung gugat pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan sistem Outsourcing diperusahaan BUMN.

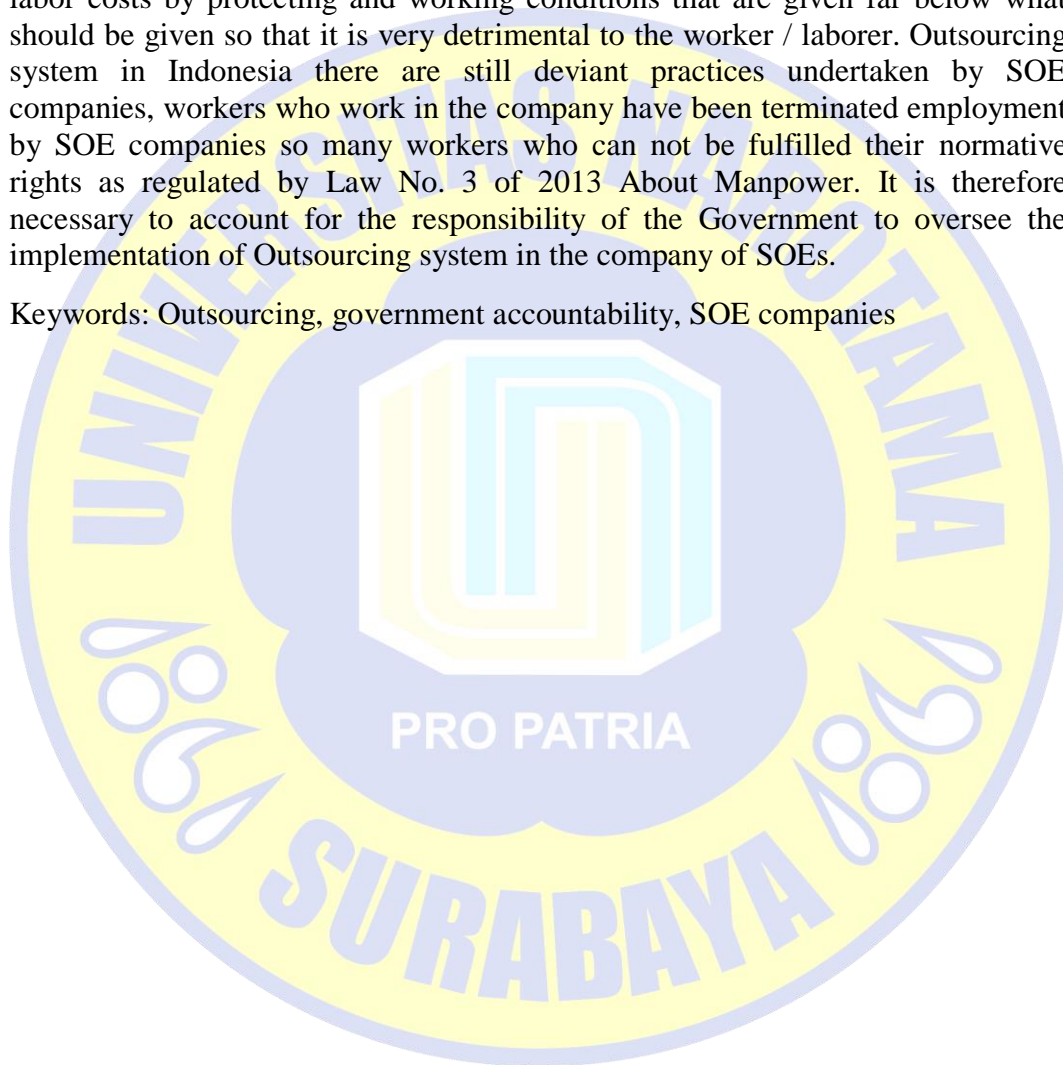
Kata Kunci: Outsourcing, tanggung gugat pemerintah, perusahaan BUMN



ABSTRACT

One of the many polemics in employment that gets the spotlight is outsourcing issues. Outsourcing can also be referred to as employment contract. Article 64 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower states that a company may deliver part of its work to another company through employment contracting agreements or the provision of services made in writing. outsourcing is mostly done to reduce labor costs by protecting and working conditions that are given far below what should be given so that it is very detrimental to the worker / laborer. Outsourcing system in Indonesia there are still deviant practices undertaken by SOE companies, workers who work in the company have been terminated employment by SOE companies so many workers who can not be fulfilled their normative rights as regulated by Law No. 3 of 2013 About Manpower. It is therefore necessary to account for the responsibility of the Government to oversee the implementation of Outsourcing system in the company of SOEs.

Keywords: Outsourcing, government accountability, SOE companies



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2 Penjelasan Judul.....	7
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Metode Analisis Data	12
 BAB II. PENERAPAN SISTEM <i>OUTSOURCING</i> PADA PERUSAHAAN BUMN.....	 14
2.1 Sistem Outsourcing atau pekerja Alih Daya	14

2.2 Kedudukan Pekerja Diperusahaan BUMN	24
2.2.1 Karyawan Tetap.....	25
2.2.2 Karyawan Kontrak.....	27
2.3 BUMN Sebagai Perusahaan Perseroan	34

BAB III. TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP PENYIMPANGAN OUTSOURCING DI PERUSAHAAN BUMN.....45

3.1 Tanggung Gugat.....	45
3.1.2 Pengertian Pemerintah.....	53
3.1.3 Tanggung Gugat Pemerintah	55
3.2 Penyimpangan Sistem Outsourcing pada perusahaan BUMN.....	57
3.2.1. Peran pemerintah dalam sistem Outsourcing/alih daya diperusahaan BUMN	60

BAB IV. PENUTUP65

4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Outsourcing* yang diterapkan oleh beberapa perusahaan BUMN tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksanaannya, Pelanggaran aturan itu menyebabkan pekerja *outsourcing* tidak mendapatkan hak normatif sebagaimana mestinya, sehingga sistem *Outsourcing* yang dilakukan oleh perusahaan BUMN telah melakukan pelanggaran.
2. Pemerintah dalam hal ini Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, memiliki kewenangan untuk menerbitkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis terkait pelaksanaan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 dari nota PPK ini ditindaklanjuti oleh putusan pengadilan negeri untuk memberikan kekuatan hukum memaksa bagi pengusaha untuk mentaatinya.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan maka penulis menyarankan:

1. Agar perusahaan BUMN mempekerjakan kembali dan mengangkat pekerja *Outsourcing* menjadi pegawai tetap, memberikan sanksi pada Direksi

perusahaan BUMN yang menerapkan *Outsourcing* dan mengabaikan rekomendasi dari pemerintah.

2. Perusahaan-perusahaan BUMN diwajibkan untuk menjalankan peraturan-peraturan yang sesuai dengan Nota Pemeriksaan dan/atau Penetapan, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan khususnya yang terkait dengan Undang-undang ketenagakerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, Syarif. dkk.(ed), *Memetakan Gerakan Buruh*, (Depok:Penerbit Kepik, 2012)
- Asikin, Zainal. Dkk. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Budiono. *Hukum Perburuhan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995
- Damanik, Sehat. *Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: DSS-Publising, 2006)
- Djumaedi, FX. *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Eko, Richardus dan Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*,
- Farida, Ika. *Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Wantu Tertentu dan Outsourcing*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2014)
- Handoko, Hani. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, (Yogyakarta: Edisi Kedua BPFE, 2001)
- Halim, Ridwan. *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab cetakan II*. Jakarta: PT. Gramedia, 1990.
- Hasan, M Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Huda, Miftachul. *Ilmu Kesejahteraan Sosial (Paradigma dan Teori)*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012)
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (edisi revisi), (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Kartasapoetra, Gunawi. Et.al *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*. Bandung: Armico, 1983.
- Khahim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2003

Keraf, Sony. *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah (Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith)*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996)

Kunarti, Siti. *Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan*. Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 2009

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008)

Rukminto Adi, Isbandi. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Jakarta: FISIP UI Press, 2004

Said, Ali, dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta Penerbit: Badan Pusat Statistik 2016

Soedjono, Wiwoho. *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1985.

Suwondo, Candra. *Outsourcing Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2004.

Tunggal, Iman Sjahputra. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT. Harvarindo, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja / Serikat Buruh

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Keputusan Menteri ketenagakerjaan Nomor 220/MEN/Tahun 2004 Tentang Syarat-syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

C. Skripsi / Jurnal

Heski Obilga Hutagalung, Glenn, dan Sonhaji, Solechan, *Sistem Outsourcing Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Diponegoro law Journal, Vol. 6 No. 1 Tahun 2009.

Julianti, Lis. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015

Khusnul latifah, Restu. *Kesejahteraan Buruh Outsourcing*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Kunarti, Siti. *Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Hal. 71 Tahun 2009.

Putri, Nurhikmah. *Analisis Perbandingan Kinerja Karyawan Tetap Dengan Karyawan Outsourcing (Kontrak)*, UIN Alauddin Makassar, 2017

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: PT Gramedia, 2010

E. Website

Judy Winarno, *Penyebab praktik Outsourcing menyimpang di perusahaan BUMN* <http://www.hukumonline.com> di akses 30 April 2018, pukul 11.00 Wib.

Ike Farida, *Outsourcing Berkeadilan* <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6705dfdd55f/ike-farida-dan-konsep-outsourcing-berkeadilan>

_____, *Konsep Dasar Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan Penyedia Jasa Pekerja* <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a635958aeb1a/cermati-konsep-dasar-perjanjian-pemborongan-pekerjaan-dan-penyedia-jasa-pekerja>

Rosidi Iman, Sistem *Outsourcing* di Perusahaan banyak menyimpang, <https://ekbis.sindonews.com/read/675249/34/sistem-outsourcing-di-perusahaan-banyak-menyimpang-1348735922>, Di akses tgl 19 juni 2018 Pukul 17.00 wib

Febriana Firdaus, “*Hanif Dhakiri menjawab 10 tuntutan buruh*”, <http://www.rappler.com/indonesia/104461-hanif-dhakiri-menjawab-10-tuntutan-buruh>, (diakses pada tanggal 19 Juni 2018)

Kahar S. Cahyono, “*Said Iqbal: Buruh Menggugat!*”, <http://fspmi.or.id/said-iqbal-buruh-menggugat.html>, (diakses pada tanggal 19 Juni 2018)

